

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Priyatmanto, 2016, *Revitalisasi Kewenangan PTUN (Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1966. *Hukum Administrasii Negara*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hadjon dan Tatiek Sri. 2011. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya cetakan pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Latif, Abdul. 2016. *Adminitrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi: Edisi 2*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Prins dan Kosim. 1978. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara Cet. Ke-6*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sampara, dkk. 2011. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, cetakan II*. Yogyakarta: Total Media.
- Saputra, M.Natta, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____ dan Sri Mamuju. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

- Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suteki dan Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunandi, 2010, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Surabaya: Kencana.
- Yunus, Benny. 1980. *Intisari Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni.

Jurnal / Majalah / Karya Tulis Ilmiah

- Elpah, Dani, dan Budi Suhariyanti. 2017. *Penyalahgunaan Wewenang (Titik Singgung PTUN-Tipikor-Ombudman)*, 2017, hlm. 53-61, dalam Yosran, *Perlindungan Hukum Pejabat Pemerintahan pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang*, Disertasi (Ringkasan), Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Fadil, Muhammad, 2012, *Bentuk Pemerintahan Dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah Pengantar Filsafat Politik Klasik)*. Jurnal Kybernan Vol.3, No. 1.
- Hadjon, Phillipus. *Tentang Wewenang*. Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII Sep-Des 1997.
- Muladi. 2001. *Sistem Pembuktian Terbalik*. Majalah Varia Peradilan Jakarta.
- Pramono, Agus. 2013. *Kekuasaan dan Hukum Dalam Perkuatan Pemberantasan Korupsi*. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 No.1.
- Ridawa, dkk. 2018. *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustitum No.2 Vol. 25.
- Surya, I Nyoman. 2018. *Pembatasan Terhadap Asas *Freis Ermessen**, Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.9, No.2.
- Tansi, Adabella, dkk. 2017. *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Dan Jabatan Terhadap Dana Pembayaran Ganti Rudi Warga Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Dalam Putusan Pengadilan Tipikor*

Pada Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Semarang No:89/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor/Smg Jo Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No:04/Pid.Sus/2014/PT/Smg. Diponegoro Law Journal, Vol.6, No. 2.

Wahyunadi, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Disertasi FH Univ. Trisakti (Jakarta: 2016).

Wahyunadi, *Teori dan Latar Belakang Pemikiran Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*, Hasil Diklat Hakim PTUN di Bogor tanggal 1 September 2020.

Yulius, 2015, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014)*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4 No. 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun Nomor 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sumber Lainnya

<https://nasional.kompas.com/read/2015/07/22/08213471/Hari.Ini.KPK.Periksa.Gubernur.Sumut.Terkait.Suap.Hakim.PTUN.Medan> , diakses pada tanggal 3 September 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada 13 September 2020 pukul 21.13.

<http://www.kejaksaan.go.id/upling/Peran%20PNS%20dalam%20membangun%20budaya.ppt>, diakses pada tanggal 4 November 2020 pukul 22.12 WIB.

FGD Hibah Riset Utama FH UI, *Perluasan Kompetensi Absolut PTUN dan Objek Sengketa TUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Kewenangan Mengadili Perbuatan Pelanggaran Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan*, diadakan secara online (zoom) pada tanggal 14 November 2020.